



SALINAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 42/DPRD/188.45/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), maka dipandang perlu merencanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2024;
- b. bahwa rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas dan di susun oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022) Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 36) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 75);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Makassar No.188.34/2465/B.HUK/XI/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;
  2. Surat Ketua Badan Pembentukan Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor Bapemperda/03/DPRD/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023;
  3. Surat Pimpinan Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Nomor K.A/36/DPRD/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023;
  4. Surat Ketua Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Makassar Nomor K.B/28/DPRD/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
  5. Surat Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar Nomor Komisi C/33/DPRD/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;
  6. Surat Pimpinan Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar Nomor Komisi D/37/DPRD/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;
  7. Laporan hasil rapat Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Makassar Nomor Bapemperda/159/DPRD/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2023
  8. Laporan hasil rapat Badan Musyawarah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan DPRD ini;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar yang menjadi prioritas Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 27 Desember 2023

**KETUA DPRD KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**RUDIANTO LALLO, SH., MH**

**Tembusan :**

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Wali Kota Makassar;
3. Pimpinan DPRD Kota Makassar;
4. Para Ketua Fraksi DPRD Kota Makassar;
5. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Makassar;
6. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar;
7. Sekretaris DPRD Kota Makassar;
8. Peninggal.-

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar



MUH. IZHAR KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
MAKASSAR.

NOMOR : 42/DPRD/188.45/TAHUN 2023

TANGGAL : 27 DESEMBER 2023

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA  
MAKASSAR TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>SKPD/AKD PENGUSUL</b>	<b>SKALA PRIORITAS</b>
1.	Rancangan Perda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pemerintah Kota Makassar (BPKAD)	Baru
2.	Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Kota Makassar (BPKAD)	Baru
3.	Rancangan Perda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pemerintah Kota Makassar (BPKAD)	Baru
4.	Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2022-2042	Pemerintah Kota Makassar (Dinas Penataan Ruang)	Lanjutan
5.	Rancangan Perda Tentang Omnibus Sombere And Smart City	Pemerintah Kota Makassar (Balitbangda)	Baru
6.	Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Persampahan	Pemerintah Kota Makassar (Dinas Lingkungan Hidup)	Baru
7.	Rancangan perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar tahun 2024-2025	Pemerintah Kota Makassar (Bappeda)	Baru
8.	Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	Pemerintah Kota Makassar (Dinas Kepariwisata)	Baru

9.	Rancangan Perda tentang Pendirian Holding Company Perseroan Daerah Makassar Incorporated	Pemerintah Kota Makassar (Dinas Perekonomian)	Baru
10.	Rancangan Perda tentang Keolahragaan	Pemerintah Kota Makassar (Dinas Pemuda Dan Olahraga)	Baru
11.	Rancangan Perda Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	Komisi A DPRD Kota Makassar	Baru
12.	Rancangan Perda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi	Komisi A DPRD Kota Makassar	Lanjutan
13.	Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Air Limbah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar	Komisi B DPRD Kota Makassar	lanjutan
14.	Rancangan Perda Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Terminal Metro Kota Makassar	Komisi B DPRD Kota Makassar	lanjutan
15.	Rancangan Perda Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar	Komisi B DPRD Kota Makassar	Baru
16.	Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Komisi C DPRD Kota Makassar	Baru
17.	Rancangan Perda Tentang Bangunan Gedung Hijau	Komisi C DPRD Kota Makassar	Baru
18.	Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Komisi C DPRD Kota Makassar	lanjutan
19.	Rancangan Perda Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS	Komisi D DPRD Kota Makassar	Baru
20.	Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak	Komisi D DPRD Kota Makassar	lanjutan
21.	Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	Anggota DPRD	Baru

22	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Lokasi Pusat Pergudangan Dan Pengelolaan Terminal Cargo	Anggota DPRD	Baru
23.	Rancangan Perda tentang Penataan dan Pengendalian Reklame	Bapemperda DPRD Kota Makassar	Baru
24.	Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD	Bapemperda DPRD Kota Makassar	Baru
25.	Rancangan Perda tentang Penanggulangan Bencana	Bapemperda DPRD Kota Makassar	Baru

**KETUA DPRD KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**RUDIANTO LALLO, SH., MH**